

## **Analisis Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat (2009-2020)**

**Rusli<sup>1</sup>, Desmaniar<sup>2</sup>, Novia Amirah Azmi<sup>3</sup>, Aqil Teguh Fathani<sup>4\*</sup>**

<sup>1</sup>*Department of Islamic Education, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, [drshrulimag@gmail.com](mailto:drshrulimag@gmail.com)*

<sup>2</sup>*Department of History of Islamic Civilization, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, [bundodes20@gmail.com](mailto:bundodes20@gmail.com)*

<sup>3</sup>*Department of Communication Science, Universitas Perintis Indonesia, Padang, [noviaamirahazmi@gmail.com](mailto:noviaamirahazmi@gmail.com)*

<sup>4</sup>*Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, [aqil.teguh.psc19@mail.umy.ac.id](mailto:aqil.teguh.psc19@mail.umy.ac.id)*

Diterima: 28 Juli 2021    Disetujui: 5 Agustus 2021    Dipublikasikan: 7 Agustus 2021

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat sehingga dapat menguasai politik daerah dalam 12 tahun (2009-2021). Berbagai daerah di Indonesia memiliki ciri-ciri khas untuk menentukan suatu pilihan terutama dalam memenangkan kontestansi politik daerah, salah satunya provinsi Sumatera Barat yang dikenal sangat kental dengan sosial dan kebudayaan yang berbasis keagamaan atau agama islam. Berbagai upaya telah dilakukan partai politik untuk meraih kekuasaan legislative dan eksekutif dari penguasaan PKS. Metode dalam penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan rasionalistik karena dapat mengungkap dan meneliti lebih dalam untum suatu permasalahan. Hasil penelitian menampilkan bahwa PKS selalu berkuasa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tiga (3) periode terakhir (2010 2015,2020). Kemudian perolehan kursi legislative terus meningkat signifikan, semua pencapaian ini dikarenakan PKS berhasil melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan memadukan konsep keagamaan atau nilai-nilai syari'ah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga didukung adanya kesaamaan paham dan ideologi dalam menjalankan kehidupan. Kemudian dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat PKS selalu konsisten dalam melakukan pendekatan dengan mengutamakan nilai-nilai agama kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat dapat diperoleh sepenuhnya.*

**Kata kunci :** *Politik Identitas, Pendekatan Keagamaan, Partai Keadilan*

*Sejahtera, Sumatera Barat*

***Abstract***

*The purpose of this study was to determine and analyze the approach taken by the Prosperous Justice Party (PKS) in West Sumatra so that it can dominate regional politics within 12 years (2009-2021). Various regions in Indonesia have unique characteristics to make choices, especially in winning regional political contestation, one of which is West Sumatra province, which is known to be very thick with social and cultural based on religion or Islam. Various attempts have been made by political parties to gain legislative and executive power from the control of PKS. This research method is qualitative with a rationalistic approach because it can reveal and examine more deeply for a problem. The results show that PKS has always been in power to implement the election for governor in the last three (3) periods (2010, 2015, 2020). Then the acquisition of legislative seats continued to increase significantly. These achievements were due to the success of PKS approaching the community by integrating religious concepts or sharia values in government administration and supported by a shared understanding and ideology in running life. Then in maintaining and increasing trust in the community, PKS is always consistent in approaching by prioritizing religious values to the community so that people's trust can be obtained fully.*

***Keywords:*** *Identity Politics, Religious Approach, PKS, West Sumatera*

## Pendahuluan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pendekatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat sehingga dapat menguasai politik lokal dalam 12 tahun (2009-2021). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang lahir dari gerakan tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia (Sumber). Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di Era Orde Baru, kemudian Gerakan ini juga dipahami sebagai langkah awal untuk memulai pendekatan kepada mahasiswa dalam memenangkan kontestasi politik di Indonesia<sup>1</sup>.

Dalam sebuah negara demokrasi pemimpin dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>2,3</sup>. Proses ini merupakan jalan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan kriteria dan keinginan masyarakat yang menginginkan suatu perubahan<sup>4</sup>. Selain itu ini merupakan akhir dari sesuatu yang lama sekaligus menjadi awal dari sesuatu yang baru bagi rakyat, sehingga tak jarang proses pergantian kepemimpinan ini dianggap sebagai pesta demokrasi oleh berbagai kalangan. Penerapan pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi di berbagai belahan dunia memiliki dinamika yang berbeda-beda. Pada negara-negara yang homogen misalnya, preferensi dalam memilih pemimpin lebih dititik beratkan pada isu apa yang ia bawa, untuk kepentingan siapa dan bagaimana ia akan menjalankan roda kepemimpinannya setelah ia terpilih<sup>5</sup>.

Sementara, di negara-negara yang penduduknya heterogen, faktor identitas seperti etnis, agama, ras, warna kulit, usia, penampilan, budaya, dan bahasa menjadi aspek primordial yang sangat menentukan keberpihakan seseorang terhadap calon pemimpin yang akan ia pilih<sup>6,7</sup>. Pelibatan aspek primordial dalam demokrasi untuk mengarahkan keberpihakan berdasarkan identitas tertentu disebut dengan politik identitas<sup>8</sup>. Terkait dengan hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi, dimana sebagian mengatakan bahwa politik identitas merupakan indikator primordialitas karena memilih pemimpin bukan berdasarkan kapasitas melainkan atas dasar identitas, sementara sebagian lainnya mengatakan baik karena pemimpin

---

<sup>1</sup> Muhamad Ramadan Habibi, "Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Sorotan Media Di Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15, no. 1 (2019): 115–41, doi:10.24042/tps.v15i1.4302.

<sup>2</sup> (Purnaweni, 2004

<sup>3</sup> Ma'arif, 2012)

<sup>4</sup> M Fikri and Nico A Oktario, "Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 2 18, no. 2 (2018): 172–134.

<sup>5</sup> Dharma Kelana Putra, "Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslim Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 21, no. 2 (2019): 236–44, doi:<https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p236-244.2019> 236.

<sup>6</sup> (Ma'arif, 2012;

<sup>7</sup> Xiaomei, 2014)

<sup>8</sup> Kwame Anthony Appiah, "The Politics of Identity," *Daedalus* 135, no. 4 (2006): 15–22.

yang terpilih akan mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai kelompok mayoritas<sup>9,10</sup>.

Pada tahun 2003 Partai keadilan bertransformasi ke Partai Keadilan Sejahtera hal tersebut juga berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Barat diketuai oleh Tifatul Sembiring dan juga Hidayat Nur Wahid. Sejak bertransformasi Partai Keadilan Sejahtera mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan terjadi karena beberapa hal yaitu, Pertama, PKS merupakan partai berbasis Islam yang lahir pada era reformasi dan tidak memiliki hubungan dengan rezim orde baru<sup>11</sup>. Kedua, Partai ini lahir bukan dari organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Ketiga, partai PKS mampu menyerap aspirasi dan dukungan dari masyarakat karena mengutamakan ajaran Islam<sup>12</sup>.

Pengaruh ideologi yang sejalan dengan masyarakat, memudahkan PKS untuk berkembang luas, termasuk pada daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat yang dikenal sangat kental dengan ajaran Islam serta kehidupan sosial-budaya yang homogen memudahkan PKS untuk menguasai wilayah Sumatera Barat termasuk menguasai kursi politik daerah tersebut<sup>13</sup>. Kemudian pada pengelolaan sistem kaderisasi serta agenda utama yang menolong masyarakat dan ummat, maka dinilai bahwa PKS merupakan partai yang sangat baik dalam penampung aspirasi masyarakat<sup>14</sup>.

PKS sebagai partai berideologi Islam memiliki usaha untuk peningkatan jumlah kader maupun basis massa pada setiap waktunya yang terlihat pada pemilu 2004, 2010, 2015, 2019 dan 2020 yang lalu, sehingga hal ini dapat diteliti yaitu dalam perjalannya di dunia demokrasi dan juga dalam penentuan kriteria serta mekanisme untuk menjaring para kadernya, bagaimana PKS menanamkan ideologi Islam pada calon kadernya sehingga menghasilkan kader yang berkualitas yang tidak saja dapat di nilai oleh partai sendiri tetapi juga pada masyarakat untuk memperoleh posisi jabatan publik dan juga pada Islam yang menjadi ideologi nya<sup>15</sup>. Hal ini terbukti karena sejak tahun 2010 hingga 2020, PKS selalu memenangkan kontestansi pemilihan umum gubernur (pilgub) provinsi Sumatera Barat. dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

---

<sup>9</sup> (Haboddin, 2012

<sup>10</sup> Burhan & Sani, 2013)

<sup>11</sup> Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia* (Routledge Taylor & Franxcis, n.d.).

<sup>12</sup> William Liddle, "Politics, Islam and Public Opinion," *Journal of Democracy* 15, no. 1 (2004).

<sup>13</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002).

<sup>14</sup> Amir Syamsuadi et al., "Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2020): 1–22, doi:10.15575/jispo.v10i1.8162.

<sup>15</sup> Sibghatullah Arrasyid, Husaini Husaini, and Zainal Abidin, "Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020): 77–86.

**Tabel 1. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2010-2020**

Gubernur	Koalisi Partai	Tahun	Kemenangan
Irwan-Prayitno - Muslim Kasim	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b> -Partai Hanura - Partai Bintang Reformasi	2010	32.44%
Irwan Prayitno – Nasrul Abit	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b> – Partai Gerindra	2015	58-41.38%
Mahyeldi – Audy Joinaldy	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b> – Partai Persatuan Pembangunan	2020	32.43%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat tahun 2020

Pada tahun 2010, PKS berhasil memenangkan kompetensi pemilihan gubernur (pilgub) dengan kemenangan 32.44% dari 2.027.870 suara sah<sup>16</sup>. Sejak kemenangan pilgub tersebut, partai PKS terus melanjutkan kekuasaannya hampir ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, hingga tahun 2020. Tabel 1 menampilkan bahwa kursi Sumatera Barat 1 selalu dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hal ini menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat Sumatera Barat terhadap PKS terus berlangsung dari tahun 2010 hingga 2020, walaupun dapat pertentangan dan perdebatan dalam pilgub 2020 dari beberapa partai yaitu Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) PKS tetap berhasil memenangkan kompetensi pilgub provinsi Sumatera Barat.

Besarnya kepercayaan masyarakat Sumatera Barat kepada partai keadilan sejahtera (PKS) tidak terlepas dari pendekatan dan jenis sosialisasi yang dilakukan para kader untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, hipotesa awal mencoba menganalisa bahwa kepercayaan ini timbul dengan sendirinya dari dalam masyarakat karena pendekatan yang digunakan sejalan dengan kultur sosial-budaya masyarakat Sumatera Barat-Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabulla (ABS-SBK)* atau mengamalkan nilai-nilai islam dalam menjalankan kehidupan<sup>17</sup>. Artikel ini mencoba menganalisis dan mengkaji strategi politik PKS dalam memenangkan persaingan dalam memenangkan politik di provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2010-2020.

<sup>16</sup> KPU, "Hasil Pemilu 2020," *Komisi Pemilihan Umum 2020*, 2020, <https://infopemilu.kpu.go.id/>.

<sup>17</sup> Aqil Teguh Fathani and Zuly Qodir, "Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila," *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 26, no. 1 (June 2020): 117–28, doi:10.31969/alq.v26i1.828.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Identitas Politik**

Konsep politik identitas pada dasarnya berbeda dengan konsep identitas politik, tetapi keduanya mengakar pada konsep yang sama yaitu identitas. Secara bahasa identitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu “*idem*” yang bermakna “Sama”, sedangkan secara istilah, identitas merujuk pada istilah bersama, yaitu pengakuan atas keberadaan, penerimaan, dan afiliasi terhadap sebuah subjek<sup>18</sup>. Baik identitas politik maupun politik identitas yang secara bersama menempatkan seseorang pada sikap politik tertentu dan keberpihakannya berdasarkan konstruksi identitas yang ia miliki, baik secara sosial maupun kultural<sup>19</sup>. Dari dua pandangan ini, dapat ditarik suatu definisi bahwa politik identitas merujuk pada praktik politik yang didasarkan pada pemanfaatan kesadaran akan kesamaan identitas tertentu, seperti; warna kulit, jenis kelamin, agama, budaya, pekerjaan, etnis, ras, dan usia.

Politik identitas pada dasarnya memiliki perbedaan dengan politik aliran yang kembali populer di era pasca reformasi. Politik aliran merujuk pada kelompok-kelompok sosio-budaya yang berkembang dari pembelahan kultural masyarakat Jawa ala Geertz (santri, priyayi, dan abangan) dan kemudian menjelma sebagai organisasi politik dengan menganut arah serta posisi ideologis yang sama<sup>20</sup>. Sementara politik identitas cenderung mengedepankan kesamaan identitas terlepas dari adanya implikasi bahwa kesamaan identitas memiliki kesamaan arah dan posisi ideologis. Politik identitas seyogyanya merupakan strategi dalam politik, yang apabila dipraktikkan dapat berarti baik atau buruk, tergantung siapa, bagaimana, dan untuk tujuan apa politik ini dimanfaatkan<sup>21,22</sup>. Penggunaan politik identitas sebagai strategi pada dasarnya memiliki tujuan yang fundamental, seperti membela dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas karena identitas yang dimilikinya.

Pada proses pergantian kepemimpinan, politik identitas cenderung dimaksudkan untuk mengarahkan pilihan kepada calon pemimpin yang memiliki kesamaan identitas dengan mereka, baik identitas agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, budaya, pekerjaan, ras, dan usia<sup>23</sup>. Dalam praktiknya, politik identitas

---

<sup>18</sup> Xiaomei, “Political Identity: A Perspective from Cultural Identity. *Journal Social Sciences in China*.”

<sup>19</sup> Endang Sulastri et al., “Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta,” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 308–32.

<sup>20</sup> Salim Alatas, “Politik Aliran Dalam Pemilu 2009 (Studi Atas Political Marketing Partai Keadilan Sejahtera),” *Jurnal Kom Dan Realitas Sosial* 1, no. 1 (2010): 37–48.

<sup>21</sup> (Appiah, 2006;

<sup>22</sup> Ma’arif, 2012)

<sup>23</sup> Nadirsah Hawari, “Menelisik Langkah Strategis PKs Tulang Bawang Pada Pemilu 2009,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 2 (2020): 1–20.

dihembuskan oleh seorang elit terhadap kelompok mayoritas untuk memperoleh legitimasi dalam setiap tindakan politiknya, sementara di sisi lain digunakan oleh kelompok tersebut untuk menentukan pilihan berdasarkan kesamaan-kesamaan identitas tertentu<sup>24</sup>. Praktik ini menimbulkan reaksi negatif dan penolakan dari kelompok minoritas, terutama dalam proses pergantian kekuasaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara moral praktik politik identitas dalam pergantian kepemimpinan dinilai buruk, karena pemimpin yang terpilih karena praktik politik identitas dianggap seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak berimbang, berat sebelah, memihak pada satu sisi dan memarjinalkan sisi lainnya sehingga berpotensi memunculkan konflik horizontal pada tataran tertentu<sup>25</sup>. Terlebih lagi, pemimpin terpilih dikhawatirkan hanyalah sebatas simbol keislaman dan tidak memiliki keunggulan dalam kapasitasnya. Tetapi dari sudut pandang yang berbeda, praktik politik identitas dinilai relevan dan fungsional sehingga hampir setiap orang kini melakukannya. Ini senada dengan pendapat<sup>26</sup> yang mengatakan bahwa Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.

### **Identitas Agama**

Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak memisahkan hubungan antara agama dan negara<sup>27</sup>, pernyataan ini bisa dilihat dalam sila pertama Pancasila dan Bab XI Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama. Hubungan agama dan negara sering kali menjadi pro dan kontra, dikarenakan agama sering kali digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan sering dijadikan kekuatan untuk menekan agama. Negara dalam pandangan Islam menurut (Al- Mawardi, 1950) yaitu di dalam negara ada agama yang dijunjung tinggi, di dalam negara ada penguasa yang berwibawa, di dalam negara harus ada keadilan, di dalam negara tercipta keamanan, di dalam negara ada generasi, dan di dalam negara harus terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu salah satu unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama, sehingga nantinya agama memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hubungan agama dengan negara dinilai sangat erat dan saling berhubungan dalam berbagai aspek<sup>28</sup>. Berbagai kalangan cendekiawan, ilmuwan dan agamawan di Indonesia menyepakati bahwa agama memberikan pedoman yang berasal dari Tuhan dan berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk, dengan fungsi

---

<sup>24</sup> Fikri and Oktario, "Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal."

<sup>25</sup> Ma'arif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*.

<sup>26</sup> Haboddin (2012)

<sup>27</sup> Aqil Teguh Fathani and Zuly Qodir, "Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila," *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 117–28, doi:10.31969/alq.v26i1.828.

<sup>28</sup> Hawari, "Menelisik Langkah Strategis PKs Tulang Bawang Pada Pemilu 2009."

seperti ini tujuan pokok agama adalah keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian kepada penganutnya<sup>29</sup>. Pemahaman terhadap pola hubungan agama dan negara dengan pendekatan Islam pada dasarnya tidak untuk mendirikan negara agama atau negara Islam, akan tetapi untuk mengisi ruang-ruang agama yang lebih fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>30</sup>.

Melihat pola hubungan identitas agama dalam dunia politik Indonesia melalui partai-partai politik Islam pasca reformasi memiliki dua aliran yang berbeda dan terkadang mengalami gesekan<sup>31</sup>. Pertama, aliran yang menganut bahwa syar'ah Islam harus diterapkan dalam system pemerintahan, hal ini banyak dikemukakan oleh partai-partai besar seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua, mempercayai untuk menolak dalam mengimplementasikan Syariah dalam system pemerintahan, aliran ini dianut oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan dalam hal kontestansi politik di Sumatera Barat lebih banyak meyakini aliran pertama, karena adanya hubungan yang erat antara agama, budaya dan pemerintahan yang dari dahulu telah berlangsung.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik<sup>32</sup>. Pendekatan rasionalistik ini sangat sesuai dengan model penelitian kualitatif karena dapat mengungkap, mengkaji dan meneliti lebih jauh melihat mengenai perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak mulai berkuasa tahun 2009-2020 di Sumatera Barat.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>33</sup>. Tujuan menggunakan metodologi kualitatif ini adalah agar peneliti dapat mendeskripsikan mengenai perkembangan PKS di provinsi Sumatera Barat. Secara garis besar

---

<sup>29</sup> Muhammad Ishak, "Hubungan Antara Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam," *Jurnal Tahkim* 10, no. 2 (2014): 109–31.

<sup>30</sup> Hamsah Hasan, "HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia," *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 19–42, doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.192.

<sup>31</sup> Fitri Ramdhani Harahap, "Politik Identitas Berbasis Agama," in *Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna* (Yogyakarta: Konferensi Nasional Sosioogi, Mei 2014, 2014), 517–27.

<sup>32</sup> Budiarti Budiarti, "Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila," *Jurnal Zawiyah: Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 41–61, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/995>.

<sup>33</sup> A Anggito and J Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari (Jawa Barat: CV. Jejak Publisher, 2018).



penelitian ini mengungkap bagaimana model pendekatan dan interaksi dengan masyarakat sehingga dapat berkuasa di Sumatera Barat selama 11 tahun.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari website dan media sosial PKS, media online umum, media cetak, jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian. Data tersebut dikumpulkan dan dilakukan penyaringan untuk memilih data yang sesuai dengan arah penelitian, kemudian data-data tersebut ditelaah dan dilakukan analisis sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil penelitian dipilih dan disusun menjadi satu-kesatuan yang berkesinambungan sesuai dengan topik penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah<sup>34</sup>. Bila manajemen partai politik berjalan dengan baik, maka posisi partai politik tersebut dapat berkiprah di pentas politik secara baik dan pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap kualitas bangunan demokrasi. Sebaliknya, bila manajemen partai politik tidak berlangsung dengan baik, maka kiprahnya sebagai partai politik akan menjadi buruk pula. Bahkan lebih dari itu, partai politik dengan manajemen yang buruk dapat memberikan dampak buruk bagi bangunan demokrasi<sup>35</sup>.

Salah satu upaya manajemen partai politik yang umum dilakukan oleh partai politik di Indonesia adalah keterbukaan dalam strategi politik. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam kasus PKS. Partai ini awalnya merupakan gerakan dakwah Tarbiyah di berbagai kampus terkemuka di Indonesia. Karena itu, sejak didirikan tahun 1998, PKS mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah yang berusaha maraup suara pemilih dari kalangan Muslim muda perkotaan. Tetapi, sejak musyawarah kerja nasional (Mukernas) Bali 2008, PKS kemudian mengalami pergeseran dengan membuat strategi politik melalui pelebaran ceruk pemilihnya, salah satunya dengan merekrut calon anggota legislatif dari non-Muslim. Hal ini menandai perubahan penting dalam tubuh PKS yang berakibat pada munculnya faksi di kalangan internal partai tersebut.

Kebijakan PKS menjadi partai terbuka tersebut secara politis tidak hanya terkait dengan pragmatisme politik, tetapi juga dinamika politik internal partai. Dari perspektif pragmatisme politik, pilihan PKS mengubah baju partainya dari partai dengan kesan “eksklusif” menjadi partai yang terbuka tidak lepas dari target-target politik praktis PKS terutama terkait perolehan suara pada Pemilu, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD). Maka,

---

<sup>34</sup> Amir Syamsuadi and M.H.D Rafi Yahya, “Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015,” *Journal of Governance* 3, no. 2 (2018): 133–53.

<sup>35</sup> Asep Abdul Sahid and Kadar Nurjaman, “Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik,” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2017): 137–57.

tidak mengherankan jika pergeseran ke arah partai terbuka menjadi salah satu strategi politiknya yang utama. Perubahan strategi politik PKS menjadi sebuah partai terbuka dapat menjadi “propaganda” ampuh sehingga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas tanpa tersekat oleh batas-batas primordial suku, agama, ras dan antar golongan<sup>36 37</sup>.

Dilihat dari perspektif dinamika politik internal partai, perubahan PKS menjadi partai terbuka menunjukkan kemenangan salah satu faksi dalam internal PKS sendiri. Para pengamat politik menyebutnya dengan istilah “Faksi Kesejahteraan”, “Faksi Pragmatis-Realistis” atau “Faksi Moderat” yang lebih menghendaki agar PKS menjadi partai lebih “longgar”, realistis dengan peta kondisi di lapangan, dan agresif dalam menarik dukungan di luar basis masa Islam dengan terobosan-terobosan yang lebih berani. Hal ini berseberangan dengan faksi lain yang dikenal dengan istilah “Faksi Keadilan”, “Faksi Idealis-Ideologis” atau “Faksi Fundamentalis” yang lebih menghendaki PKS tetap di jalur awal sebagai partai “kanan” atau setia pada PKS “lama” dengan nilai-nilai Islam yang kental dan konservatif.

Sebagai sebuah partai politik, perubahan kebijakan PKS menjadi partai terbuka merupakan bagian dari strategi komunikasi politik partai yang muaranya berujung pada upaya untuk mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dalam rangka untuk memperkuat posisinya dalam pusaran kekuasaan politik di Indonesia. PKS mencoba mempromosikan diri agar posisinya lebih bisa diterima masyarakat melalui strategi politik sebagai partai terbuka bagi semua elemen anak bangsa. Dilihat dari sudut pandang komunikasi politik lebih jauh, kebijakan PKS menjadi partai terbuka adalah bagian dari propaganda partai<sup>38</sup>.

Dalam konteks ini, PKS mencoba menggunakan ide-ide umum yang berlaku di masyarakat luas sebagai pesan politiknya agar eksistensinya, baik sebagai sebuah komprador politik maupun sebagai sebuah komunitas Islam, lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ide-ide umum yang dimaksud adalah fakta sosiologis kemajemukan bangsa Indonesia yang terwadahi melalui representasi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar-pilar kebangunan bangsa Indonesia. Hal lainnya adalah pengasosiasian ide-ide umum bahwa PKS merupakan bagian dari Islam moderat mengingat mayoritas Muslim Indonesia memiliki pemahaman Islam yang moderat (pertengahan). Islam moderat sendiri dipandang sebagai model penafsiran secara teologis atas ajaran Islam yang

---

<sup>36</sup> Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 57–78, doi:10.35673/ajmpi.v5i1.677.

<sup>37</sup> Sri Herwindya Wijaya, *Komunikasi Politik Partai Terbuka Ala PKS* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014).

<sup>38</sup> Ibid.

dinilai lebih sesuai, lebih terbuka dan lebih bisa menerima fakta pluralitas termasuk kemajemukan bangsa Indonesia. Karenanya, pilihan PKS menjadi partai terbuka adalah pilihan yang rasional mengingat partai terbuka dianggap sebagai wadah terbaik yang dapat menampung pluralitas bangsa Indonesia melalui representasi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan maupun asosiasinya sebagai bagian Muslim moderat.

Karena itu, melalui penggunaan teknik propaganda ini, diharapkan PKS bisa lebih hadir dan diterima oleh semua komponen anak bangsa, meskipun secara ideologis, PKS secara tegas tetap menganut ideologi Islam. Berdasarkan pandangan pragmatisme politik tersebut, PKS mencoba melakukan sebuah akrobat politik melalui praksis “keterbukaan” sebagai kebijakan baru partai. Strategi politik ini merupakan bentuk komunikasi politik partai dalam upaya agar masyarakat Indonesia, baik secara struktural maupun kultural, lebih dapat menerima PKS. Dalam pengalaman Pemilu 1999-2019 mengambil kesimpulan bahwa menjadi sebuah partai terbuka bagi semua golongan adalah pilihan tepat untuk meraih dukungan suara semaksimal mungkin dari pemilih. Hal ini terbukti pada Pemilu 1999 bernama Partai Keadilan (PK) hanya memperoleh 1,6% atau 1,4 juta suara nasional. Hal ini tidak lepas dari penggunaan simbol-simbol kelompok maupun pesan-pesan komunikasi politiknya yang relatif terkesan “eksklusif” di mata umumnya masyarakat Indonesia. Tetapi, hal tersebut kemudian berubah drastis pada pemilu 2004, di mana peraihan suara PKS (setelah berganti nama) melonjak menjadi 7,3% atau 8,3 juta suara nasional, lalu meningkat pada Pemilu 2009 yang meraih 7,8% atau 8,2 juta suara nasional, 6,79% pada pemilu tahun 2014 dan 11,4 juta suara pada Pemilu 2019.

Walaupun ada sedikit penurunan suara di tahun 2014, konsistensi dan tingkat dukungan PKS terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari pesan komunikasi politik PKS yang didesain tampil lebih “terbuka” dengan tidak mengusung lagi pesan-pesan politik yang dinilai terlalu sempit seperti tema-tema bernuansa agama (Islam), melainkan pesan-pesan politik bersifat umum yang relatif terbuka bagi masyarakat luas. Keterbukaan strategi politik PKS di level nasional tersebut juga kemudian tersebar secara merata dalam praktik politik di level daerah. Salah satu provinsi yang menunjukkan kesuksesan strategi politik terbuka adalah provinsi Sumatera, yang merupakan sebuah provinsi yang menjadi salah satu basis politik PKS di luar Jawa yang menjadi tempat pendulang suara terbanyak bagi PKS dalam Pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah.

Pada provinsi Sumatera Barat yang menjadi daerah unggulan dalam kemenangan pemilu 2019, PKS berhasil menjadi salah satu partai yang memperoleh suara tertinggi pada pemilu 2019 dengan perolehan 2 kursi pada DPR RI, 10 kursi DPRD Provinsi dan 72 kursi DPRD di daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, tingginya perolehan kursi ini merupakan hasil dari pendekatan yang dilakukan oleh

PKS kepada masyarakat serta membuktikan elektabilitas PKS sangat tinggi di provinsi Sumatera Barat, kemudian didukung oleh pola interaksi yang menggabungkan pendekatan agama dan budaya serta didukung oleh kultur masyarakat yang sangat kental dengan agama Islam sehingga untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat mudah untuk dicapai. Disisi lain, meskipun suara perolehan PKS tergolong tinggi tetapi masih kalah dengan pesaing terkuatnya yaitu partai Gerindra, pada penyelenggaraan pemilu 2019 Gerindra berhasil memperoleh total 110 kursi, dengan rincian 3 DPR RI, 14 DPRD Provinsi dan 93 kursi DPRD kabupaten/kota di Sumatera Barat, persaingan yang kuat antara kedua partai politik ini tidak terlepas dari koalisi partai pada pelaksanaan pemilihan gubernur sebelumnya.

Persaingan yang kuat antara partai Gerindra dengan PKS pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 juga mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Sebelum itu, pada penyelenggaraan gubernur tahun 2010, partai PKS berkoalisi dengan partai Hanura, PBR dan dapat memenangkan penyelenggaraan pilkada tersebut, lanjut pada penyelenggaraan pilkada tahun 2015 partai PKS dan Gerindra berkoalisi, koalisi ini juga didorong dan dipengaruhi oleh besarnya suara koalisi Prabowo-Hatta Rajasa (PAN, PKS dan Gerindra) pada pemilihan presiden tahun 2014 di daerah Sumatera Barat. Tingginya suara PKS dan Gerindra pada pilpres di Sumbar menjadikan PKS dan Gerindra juga berkoalisi pada pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2015 dan dengan mudah dapat memenangkan kontestansi kepala daerah tersebut. Dalam dua periode gubernur Sumatera Barat (2010 dan 2015) dapat kita lihat PKS selalu mendominasi daerah Sumatera Barat karena Calon yang diusung selalu memenangkan kontestansi gubernur, dalam penglihatan sederhana partai apapun yang bisa berkoalisi dengan partai PKS untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat selalu memenangkan kompetensi dan menariknya calon dari PKS selalu menjadi pemimpin/gubernur.

Dalam perpolitikan, pengaruh dan model pendekatan yang dilakukan oleh PKS kepada masyarakat berjalan dengan baik, yaitu berhasil mempengaruhi masyarakat dengan pendekatan keagamaan yang berbasis adat kebudayaan lokal (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*), dapat memegang kepercayaan masyarakat serta tidak memiliki kasus yang dapat menjatuhkan nama PKS sendiri. Pada pemilihan gubernur tahun 2020, PKS dan Gerindra berpisah serta memutuskan untuk mengusung calon dari partai masing-masing, walaupun perolehan kursi Gerindra lebih tinggi dari PKS tidak menyurutkan PKS untuk bersaing dalam memperoleh kursi gubernur Sumatera Barat. Pada saat Pilkada 2020 PKS hanya didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada pelaksanaan pilkada ini terlihat jelas dukungan, kepercayaan masyarakat Sumatera Barat kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hasil dari koalisi dua partai ini berhasil

memenangkan pemilihan gubernur dengan perolehan suara 726.853 suara atau 32,43%<sup>39</sup>. Kemudian disusul oleh pesaing terkuat yaitu dari Gerindra (Nasrul Abit) dengan perolehan suara 679.069 dengan persentase 30,30%, padahal pasangan ini didukung oleh 14 kursi legislatif yang mendominasi daerah Sumatera Barat.

Keberhasilan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk berkuasa di daerah Sumatera Barat tidak terlepas dari pendekatan politik terbuka serta didorong oleh ideologi keagamaan PKS terhadap masyarakat sumbar, kemudian hal ini sejalan dengan tradisi budaya dan keislaman masyarakat sehingga menghasilkan kader-kader yang berintegritas, kuat, dan lekat dengan agama. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh<sup>40</sup>, bahwa partai PKS menerapkan nilai-nilai syari'ah dalam menjalankan sistem pemerintahan di provinsi Sumatera Barat dalam 2 periode sebelumnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai PKS dapat bertahan dengan baik bahkan terjadi peningkatan dalam setiap periodel pemilu dan pilkada Sumbar. Terlepas dari itu adanya keseragaman bahwa masyarakat Sumatera Barat sangat kental dengan nilai-nilai budaya dan sosial islam sehingga memudahkan PKS untuk melakukan pendekatan dengan nilai-nilai politik islam untuk memperoleh suara masyarakat.

## Penutup

Perilaku politik yang mengedepankan kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok atas dasar kesamaan identitas, karakter yang berbasik ras, suku, etnis dan agama merupakan sebuah langkah pernyataan dari identitas politik. Politik identitas menjadi gerakan-gerakan yang bercorak kedaerahan, kesukuan dan keagamaan yang menggambarkan ciri khas dari kedaerahan dan agama tertentu. Penggunaan identitas sangat berpengaruh secara signifikan hal ini disebabkan karena identitas merupakan kunci utama dalam dunia politik. Dalam konteks politik di Sumatera Barat, identitas agama yang ditunjukkan dalam sebuah perjuangan tidak hanya ditampilkan oleh kelompok kecil tetapi ditampilkan oleh kelompok-kelompok besar. Oleh karena itu politik identitas agama muncul sebagai salah satu pengelompokan dalam konteks politik lokal, karena agama menjadi sumber daya yang kuat untuk dimobilisasi menjadi kekuatan politik.

## Daftar Pustaka

- Abuza, Zachary. *Political Islam and Violence in Indonesia*. Routledge Taylor & Franxcis, n.d.
- Alatas, Salim. "Politik Aliran Dalam Pemilu 2009 (Studi Atas Political Marketing

---

<sup>39</sup> Oktaviano Hana, "KPU Tetapkan Hasil Pilgub Sumbar 2020," *Kabar24.Com*, 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201221/15/1333539/kpu-tetapkan-hasil-pilgub-sumbar-2020-mahyeldi-audy-pemenangnya>.

<sup>40</sup> Harahap (2014)

- Partai Keadilan Sejahtera.” *Jurnal Kom Dan Realitas Sosial* 1, no. 1 (2010): 37–48.
- Anggito, A, and J Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Jawa Barat: CV. Jejak Publisher, 2018.
- Appiah, Kwame Anthony. “The POLitics of Identity.” *Daedalus* 135, no. 4 (2006): 15–22.
- Arrasyid, Sibghatullah, Husaini Husaini, and Zainal Abidin. “Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020): 77–86.
- Aspan, Zulkifli, and Wiwin Suwandi. “Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 57–78. doi:10.35673/ajmpi.v5i1.677.
- Budiarti, Budiarti. “Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila.” *Jurnal Zawiyah: Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 41–61. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/995>.
- Burhan, O.K, and J Sani. “Prasangka Terhadap Etnis Tioinghoa Di Kota Medan: Peran Identitas Nasional Dan Persepsi Ancaman.” *Jurnal Psikologika* 8, no. 1 (2013): 25–33.
- Damanik, Ali Said. *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir. “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila.” *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 117–28. doi:10.31969/alq.v26i1.828.
- . “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila.” *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 26, no. 1 (June 2020): 117–28. doi:10.31969/alq.v26i1.828.
- Fikri, M, and Nico A Oktario. “Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 2 18, no. 2 (2018): 172–134.
- Habibi, Muhamad Ramadan. “Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Sorotan Media Di Indonesia.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15, no. 1 (2019): 115–41. doi:10.24042/tps.v15i1.4302.
- Haboddin, Muhtar. “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal.” *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (2012): 109–26. doi:10.18196/jgp.2012.0007.
- Hana, Oktaviano. “KPU Tetapkan Hasil Pilgub Sumbar 2020.” *Kabar24.Com*, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201221/15/1333539/kpu-tetapkan-hasil-pilgub-sumbar-2020-mahyeldi-audy-pemenangnya>.
- Harahap, Fitri Ramdhani. “Politik Identitas Berbasis Agama.” In *Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna*, 517–27. Yogyakarta: Konferensi Nasional Sosioogi, Mei 2014, 2014.
- Hasan, Hamsah. “HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia.” *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 19–42. doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.192.

- Hawari, Nadirsah. “Menelisik Langkah Strategis PKs Tulang Bawang Pada Pemilu 2009.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 2 (2020): 1–20.
- Ishak, Muhammad. “Hubungan Antara Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam.” *Jurnal Tahkim* 10, no. 2 (2014): 109–31.
- KPU. “Hasil Pemilu 2020.” *Komisi Pemilihan Umum 2020*, 2020.  
<https://infopemilu.kpu.go.id/>.
- Liddle, William. “Politics, Islam and Public Opinion.” *Journal of Democracy* 15, no. 1 (2004).
- Ma’arif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Purnaweni, Hartuti. “Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa.” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2004): 118–31.
- Putra, Dharma Kelana. “Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslim Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 21, no. 2 (2019): 236–44. doi:<https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p236-244.2019> 236.
- Sahid, Asep Abdul, and Kadar Nurjaman. “Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik.” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2017): 137–57.
- Sulastrri, Endang, Eko Priyo Purnomo, Asep Setiawan, Aqil Teguh Fathani, and Chandra Oktawan. “Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 308–32.
- Syamsuadi, Amir, and M.H.D Rafi Yahya. “Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.” *Journal of Governance* 3, no. 2 (2018): 133–53.
- Syamsuadi, Amir, Zamhasari Zamhasari, Seri Hartati, and Liza Trisnawati. “Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2020): 1–22. doi:10.15575/jispo.v10i1.8162.
- Wijaya, Sri Herwindya. *Komunikasi Politik Partai Terbuka Ala PKS*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Xiaomei, Zhan. “Political Identity: A Perspective from Cultural Identity. *Journal Social Sciences in China* 35, no. 2 (2014): 155–73.